BHINNEKA PUBLISHING

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BHINNEKA
Volume 5, No. 2, Tahun 2026
https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb

***e-ISSN** : 2963-3753*

Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa dalam Meningkatkan Tertib Administrasi, Pengelolaan Keuangan, dan Digitalisasi Sistem Pelaporan di Kecamatan Sukamara

Qisthi Ardhi[1], Yani Riyani[2], Susan Andriana[3], Mahyus[4], Ponjaya Tri Handayani[5], Muhammad Noer Oktavian[6], Hasna Abdul Rahman[7], Alimaturraiyah[8], Wahyudi[9], Henri Prasetyo[10]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] *Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia*

Received: 03 Oktober 2026, Revised: 20 Oktober 2026, Published: 02 November 2026

Corresponding Author
Nama Author : Ponjaya Tri Handayani
E-mail: ponjayatrihandayani@gmail.com

Abstrak

Aparatur desa di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, menghadapi kebutuhan peningkatan kapasitas dalam tertib administrasi, pengelolaan keuangan, pengarsipan dokumen, dan pemanfaatan sistem digital untuk pelaporan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memperkuat kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan yang terintegrasi. Sasaran kegiatan meliputi kepala desa atau sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan atau kepala seksi, serta pendamping lokal desa, dengan estimasi 26 peserta dari delapan desa/kelurahan di Kecamatan Sukamara. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan pendampingan intensif melalui observasi dan koordinasi, penyusunan modul, workshop, praktik pengelolaan administrasi dan keuangan, pendampingan lapangan, serta evaluasi melalui pre-test, post-test, uji keterampilan, dan survei kepuasan. Solusi yang dirancang mencakup penyusunan prosedur operasional standar, sinkronisasi pencatatan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta pemanfaatan penyimpanan awan dan dashboard pelaporan desa. Dokumen sumber memuat target peningkatan skor pengetahuan minimal 30%, 80% peserta mampu melakukan input data tanpa kesalahan, dan tersedianya modul serta dokumentasi. Namun, data numerik realisasi kegiatan dan hasil evaluasi aktual belum tercantum secara terukur dalam dokumen yang menjadi dasar penyusunan artikel ini.
***Kata kunci -** administrasi desa, digitalisasi, keuangan desa, pelatihan, pendampingan*

Abstract

Village officials in Sukamara District, Sukamara Regency, require stronger capacities in administrative orderliness, village financial management, document archiving, and the use of digital reporting systems. This community service program was designed to strengthen village officials' competencies through integrated training and mentoring. The target participants comprise village heads or village secretaries, village treasurers, heads of administrative sections, and local village facilitators, with an estimated total of 26 participants representing eight villages or urban wards in Sukamara District. The program uses a participatory approach and intensive mentoring through observation and coordination, module development, workshops, practical administrative and financial management exercises, field mentoring, and evaluation using pre-tests, post-tests, skills assessments, and satisfaction surveys. The proposed solutions include standard operating procedures, reconciliation of records with the Village Financial System (Siskeudes), and the use of cloud storage and a village reporting dashboard. The source report sets targets of at least a 30% increase in knowledge scores, 80% of participants entering data without errors, and the availability of training modules and documentation. However, measured implementation figures and actual evaluation results are not reported in the source material used to prepare this article.
***Keywords -** digitalization, village administration, village finance, training, mentoring*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

How To Cite : *Ardhi, Q., Riyani, Y., Andriana, S., Mahyus, M., Handayani, P. T., Oktavian, M. N., Rahman, H. A., Alimaturraiyah, A., Wahyudi, W., & Prasetyo, H. (2026). Pelatihan dan Pendampingan Aparatur Desa dalam Meningkatkan Tertib Administrasi, Pengelolaan Keuangan, dan Digitalisasi Sistem Pelaporan di Kecamatan Sukamara. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 5(2), 1341 - 1350. https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i2.1861*
Copyright *©2026 Qisthi Ardhi, Yani Riyani, Susan Andriana, Mahyus, Ponjaya Tri Handayani, Muhammad Noer Oktavian, Hasna Abdul Rahman, Alimaturraiyah, Wahyudi, Henri Prasetyo*

PENDAHULUAN

Secara operasional, program ini direncanakan memiliki tiga aspek pembeda. Pertama, kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan pemetaan kesenjangan kompetensi aparatur, khususnya pada aspek administrasi pemerintahan yang menjadi permasalahan mitra. dan tahapan pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES yang memerlukan penguatan. Kedua, pelatihan dilaksanakan melalui praktik berbasis kasus dan dokumen kerja yang relevan dengan kondisi desa mitra, sehingga materi dapat langsung dikaitkan dengan kebutuhan pekerjaan. Ketiga, program dilengkapi dengan evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan serta pendampingan tindak lanjut untuk menilai penerapan keterampilan dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola pembangunan dan keuangan. Kewenangan tersebut perlu diimbangi dengan kapasitas aparatur, tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. (Cahyani et al., 2022; Baihaqi et al., 2023; Pribadi et al., 2024).

Berdasarkan kajian terhadap sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdahulu, pelatihan administrasi pemerintahan desa dan penggunaan aplikasi SISKEUDES telah banyak dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, workshop, simulasi, dan pendampingan teknis. Kegiatan FEB Universitas Lambung Mangkurat (2016), Hadining dkk. (2021), Hasna (2025), serta Windhuaji dan Jaenudin (2026) memperlihatkan adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa, tertib administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, kebaruan program ini tidak terletak semata-mata pada pemberian pelatihan SISKEUDES, tetapi pada pendekatan terpadu antara penguatan administrasi pemerintahan desa, praktik pengelolaan keuangan berbasis SISKEUDES, dan pendampingan penyelesaian permasalahan nyata yang dihadapi mitra. Pendekatan ini dirancang agar peningkatan pengetahuan aparatur tidak berhenti pada pemahaman materi, tetapi berlanjut pada penerapan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dari sisi luaran, program ini menargetkan modul atau panduan kerja, dokumen administrasi atau hasil praktik SISKEUDES yang telah diperiksa, serta [rencana tindak lanjut atau mekanisme pendampingan mandiri. Luaran tersebut diharapkan mendukung peningkatan ketertiban administrasi, ketepatan proses pengelolaan keuangan desa, dan kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, posisi program ini terhadap kegiatan terdahulu terletak pada integrasi antara diagnosis kebutuhan, pelatihan praktis, pendampingan berbasis permasalahan mitra, dan evaluasi penerapan hasil kegiatan. Aspek pembeda tersebut akan diukur melalui indikator yang ditetapkan sejak awal, sehingga kontribusi program dapat dinilai berdasarkan perubahan kompetensi dan praktik kerja, bukan hanya berdasarkan jumlah peserta atau terlaksananya pelatihan.

Di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, permasalahan yang diidentifikasi dalam dokumen PKM meliputi belum meratanya pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, sistem pengarsipan manual yang belum terintegrasi, serta hambatan teknis dalam pengoperasian aplikasi keuangan yang dapat berdampak pada keterlambatan pelaporan. Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah mulai diterapkan, tetapi penguasaan fitur pelaporan dan evaluasi belum merata. Mitra juga membutuhkan pendampingan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penataan dokumen aset desa. (Fauziah & Hermawan, 2022; Anggraeni & Fitriyah, 2024; Maharani & Widodo, 2024; Safelia, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel dengan kapasitas teknis serta sistem administrasi yang tersedia. Pengelolaan keuangan desa memerlukan pencatatan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan tersebut menuntut pemerintah desa untuk melaksanakan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

setiap tahapan pengelolaan keuangan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kemampuan aparatur dalam memahami prosedur administrasi dan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan tuntutan tersebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi dan prosedur kerja, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. Aparatur desa perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai penyusunan dokumen administrasi, pengelolaan arsip, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis dapat menimbulkan kendala dalam proses kerja, seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung, ketidakteraturan pengarsipan, keterlambatan penyusunan laporan, atau kesulitan menyesuaikan pencatatan dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur perlu diarahkan pada penguasaan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu instrumen yang mendukung pengelolaan keuangan desa adalah Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yaitu aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Pemanfaatan aplikasi ini dapat mendukung proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan fitur serta ketentuan yang berlaku. Namun, penggunaan aplikasi tidak secara otomatis menjamin terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel. Efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan operator, ketepatan dan kelengkapan data yang dimasukkan, pemahaman terhadap alur kerja, serta kesesuaian dokumen pendukung. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas aparatur dalam penggunaan SISKEUDES perlu disertai pemahaman mengenai keterkaitan antara administrasi pemerintahan, dokumen transaksi, dan proses pengelolaan keuangan desa.

Selain aspek kompetensi individu, keberhasilan tata kelola desa juga dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi dan koordinasi antaraparatur. Pembagian tugas yang belum optimal, prosedur kerja yang belum terdokumentasi dengan baik, serta belum konsistennya pelaksanaan pengarsipan dapat menghambat kelancaran pengelolaan administrasi dan keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan peningkatan kapasitas yang tidak hanya berorientasi pada pelatihan penggunaan aplikasi, tetapi juga memperhatikan tata kerja, kelengkapan dokumen, dan mekanisme evaluasi. Melalui pendekatan tersebut, aparatur desa diharapkan mampu memahami keterkaitan antara setiap tahapan pekerjaan dan menerapkan prosedur yang lebih tertib, konsisten, serta dapat ditelusuri.

Berdasarkan kondisi tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa melalui integrasi penguatan administrasi pemerintahan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis SISKEUDES. Kegiatan dirancang untuk diawali dengan identifikasi kebutuhan mitra, dilanjutkan dengan penyampaian materi, praktik langsung, pendampingan berdasarkan permasalahan yang ditemukan, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu aparatur meningkatkan pemahaman terhadap prosedur administrasi, mengembangkan keterampilan penggunaan SISKEUDES, dan memperbaiki ketertiban dokumentasi sesuai dengan kewenangan serta kebutuhan desa. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penerapan hasil pelatihan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Selain itu, keteraturan administrasi dan pengarsipan menjadi bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Badrudin, 2017; Soleh & Rochmansjah, 2015). (Ayem & Ariyanti, 2023; Widiawati et al., 2022; Fathurrahman et al., 2022; Sakdiyah et al., 2023). (Sofia & Fitriyah, 2022; Yudastio & Azriya, 2022; Wardani et al., 2023; Oktavia & Biduri, 2024; Hendaris & Romli, 2021; Afifi et al., 2021).

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung keterpaduan data dan akses informasi untuk kebutuhan monitoring. Dashboard desa dirancang sebagai sarana penyajian data administrasi, kegiatan, dan keuangan dalam bentuk indikator serta visualisasi yang lebih mudah dipahami. Pemanfaatan sistem digital perlu disertai peningkatan keterampilan pengguna, prosedur kerja, dan pengelolaan cadangan data agar teknologi dapat digunakan secara berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan partisipatif juga relevan karena melibatkan masyarakat sasaran dalam mengenali masalah dan mengembangkan solusi sesuai kebutuhan (Mustanir et al., 2019). (Faozanudin et al., 2023; Sihombing & Lumbantobing, 2024; Rodiyah & Bolanitan, 2024; Amiril & Choiriyah, 2024).

Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan dashboard

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

digital untuk mendukung sistem pelaporan yang terintegrasi. Solusi yang ditawarkan meliputi pelatihan regulasi dan administrasi, pendampingan penatausahaan keuangan dan penggunaan Siskeudes, penyusunan prosedur operasional standar, serta pengenalan penyimpanan awan dan dashboard desa. Sasaran manfaatnya adalah aparatur desa dan masyarakat melalui proses administrasi serta pelayanan publik yang lebih tertata. (Setyorini et al., 2022; Juwita & Murti, 2023; Khoiroh & Agustina, 2024).

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dirancang berlokasi di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan identifikasi kebutuhan mitra, pelatihan teknis, praktik langsung, pendampingan, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan aparatur dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Mitra sasaran adalah aparatur pemerintahan desa yang menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan keuangan. Sasaran yang direncanakan terdiri atas kepala desa atau sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan atau kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, serta pendamping lokal desa. Estimasi peserta dalam dokumen PKM adalah 26 orang yang mewakili delapan desa/kelurahan.

Pemerintah Kecamatan Sukamara berperan memfasilitasi koordinasi lintas desa, memberikan arahan mengenai kebutuhan wilayah, dan membantu penjadwalan kegiatan. Pemerintah desa mitra bertanggung jawab menetapkan peserta, menyediakan informasi mengenai permasalahan administrasi yang relevan, menyiapkan fasilitas dan perangkat yang diperlukan, serta memastikan kehadiran aparatur. Operator SISKEUDES dan aparatur pengelola keuangan berperan aktif dalam praktik teknis, sedangkan sekretaris desa dan aparatur administrasi membantu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan prosedur serta dokumentasi. Pembagian peran ini ditetapkan kembali melalui kesepakatan sebelum kegiatan dimulai.

Pendekatan kegiatan menggunakan metode partisipatif dan pendampingan intensif (action research). Tahap persiapan meliputi observasi dan koordinasi dengan kantor kecamatan serta kantor desa, pengurusan perizinan, penyusunan modul tertib administrasi desa, penyiapan instrumen pre-test dan post-test, serta penyediaan perangkat dan kebutuhan pelatihan. (Baihaqi et al., 2023; Fathurrahman et al., 2022).

Tahap pelaksanaan mencakup workshop terpusat dan pendampingan lapangan. Workshop dirancang untuk menyampaikan materi regulasi tata kelola keuangan desa, administrasi pemerintahan, penatausahaan, pengarsipan bukti transaksi, dan pelaporan. Pendampingan lapangan dilakukan melalui kunjungan ke kantor desa untuk meninjau dokumen administrasi yang berjalan, membantu rekonsiliasi pencatatan dengan Siskeudes, dan mendampingi praktik input data. Solusi digital yang diperkenalkan meliputi pemanfaatan penyimpanan awan sebagai cadangan dokumen dan rancangan dashboard untuk menampilkan informasi administrasi, kegiatan, serta realisasi anggaran. (Setyorini et al., 2022; Juwita & Murti, 2023).

Evaluasi dirancang dalam tiga tahap. Evaluasi proses mencakup kehadiran, partisipasi diskusi dan simulasi, serta kesesuaian jadwal. Evaluasi hasil menggunakan pre-test dan post-test, lembar kerja praktik, serta kuesioner kepuasan berskala Likert 1–5. Evaluasi keberlanjutan direncanakan melalui pemeriksaan dokumen desa, pemantauan ketepatan waktu pelaporan, dan konsultasi melalui grup koordinasi WhatsApp. Analisis pengetahuan dilakukan dengan membandingkan skor sebelum dan sesudah pelatihan; keterampilan dinilai dari ketepatan input data dan penyusunan dokumen; sedangkan kepuasan dihitung dari skor rata-rata kuesioner. (OECD, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Dalam pelaksanaannya, aparatur desa dituntut tidak hanya memahami ketentuan pengelolaan keuangan desa, tetapi juga mampu

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

menerapkan prosedur administrasi dan memanfaatkan sistem informasi secara tepat sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan, menentukan peserta, serta menyepakati bentuk pendampingan. Identifikasi kebutuhan diarahkan pada pemetaan kemampuan aparatur dalam mengelola dokumen administrasi, melakukan pengarsipan, memahami tahapan pengelolaan keuangan desa, dan mengoperasikan SISKEUDES. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan materi pelatihan dan metode pendampingan agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mitra. Pada bagian ini, perlu disajikan temuan aktual dari observasi atau wawancara, termasuk jenis kendala yang paling sering ditemukan dan aparatur yang membutuhkan penguatan kompetensi.

Kegiatan pelatihan dirancang untuk mengintegrasikan materi administrasi pemerintahan dengan praktik pengelolaan keuangan desa. Materi administrasi meliputi penataan dokumen, pengelolaan arsip, dan ketertiban prosedur kerja, sedangkan materi SISKEUDES berfokus pada pemahaman alur pengelolaan keuangan serta praktik sesuai dengan tugas peserta. Integrasi kedua materi tersebut penting karena kualitas pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga oleh ketepatan data, kelengkapan dokumen pendukung, dan keteraturan proses administrasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara terpadu agar keterampilan teknis dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.

Metode pelaksanaan menggunakan kombinasi pemaparan materi, diskusi, demonstrasi, praktik langsung, dan pendampingan berbasis permasalahan mitra. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami konsep sekaligus mempraktikkan prosedur yang relevan dengan tanggung jawab masing-masing. Dalam proses pendampingan, tim pelaksana dapat menggunakan contoh kasus dan dokumen simulasi untuk mengidentifikasi kesalahan, menjelaskan langkah perbaikan, serta memberikan umpan balik kepada peserta. Penggunaan data fiktif atau data yang telah dianonimkan perlu diterapkan apabila latihan melibatkan dokumen keuangan, sehingga proses pembelajaran tidak mengungkap informasi sensitif milik pemerintah desa.

Keberhasilan kegiatan perlu dianalisis berdasarkan data evaluasi yang dikumpulkan selama pelaksanaan. Perbandingan hasil pre-test dan post-test dapat digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta, sedangkan penilaian praktik dapat menunjukkan kemampuan peserta dalam menyelesaikan tugas administrasi atau simulasi penggunaan SISKEUDES. Selain itu, umpan balik peserta dan catatan pendampingan dapat digunakan untuk mengidentifikasi materi yang paling bermanfaat, kendala yang masih dihadapi, dan kebutuhan penguatan lebih lanjut. Hasil evaluasi tersebut sebaiknya disajikan dalam bentuk uraian yang didukung data aktual, seperti jumlah peserta yang mengikuti seluruh tahapan, perubahan nilai rata-rata, persentase penyelesaian tugas praktik, dan jenis kendala yang berhasil ditangani.

Temuan kegiatan selanjutnya perlu dibahas dengan mengaitkannya pada ketentuan pengelolaan keuangan desa dan hasil pengabdian terdahulu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menekankan pentingnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sistem administrasi merupakan bagian penting dari upaya mendukung pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan secara tepat. Apabila hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman atau keterampilan peserta, temuan tersebut dapat dijelaskan sebagai indikasi manfaat kegiatan, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan jumlah peserta, durasi pendampingan, dan ruang lingkup materi yang diberikan.

Dibandingkan dengan kegiatan PkM terdahulu yang berfokus pada pelatihan penggunaan SISKEUDES atau peningkatan kapasitas administrasi secara terpisah, program ini diarahkan pada integrasi penguatan administrasi pemerintahan, praktik pengelolaan keuangan berbasis aplikasi, dan evaluasi penerapan hasil pelatihan. Pembeda tersebut terletak pada keterkaitan antara identifikasi kebutuhan mitra, praktik berbasis kasus, pendampingan, dan evaluasi hasil kegiatan. Namun, kontribusi tersebut perlu dinyatakan berdasarkan komponen yang benar-benar dilaksanakan dan dibandingkan dengan publikasi terdahulu yang relevan. Dengan demikian, kebaruan program tidak semata-mata didasarkan pada penggunaan SISKEUDES, tetapi pada pendekatan pelaksanaan dan luaran yang dapat diidentifikasi serta dievaluasi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan mendukung peningkatan kompetensi aparatur dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa secara lebih tertib. Keberlanjutan manfaat kegiatan perlu diperkuat melalui penyediaan panduan kerja, penggunaan daftar

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

periksa kelengkapan dokumen, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Pemantauan setelah pelatihan juga diperlukan untuk mengetahui apakah keterampilan yang diperoleh benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, hasil kegiatan tidak hanya perlu dilihat dari terlaksananya pelatihan, tetapi juga dari perubahan kompetensi peserta, kualitas luaran yang dihasilkan, dan potensi penerapan prosedur kerja secara berkelanjutan di desa mitra.

Dokumen PKM mengidentifikasi bahwa aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya penyelarasan kompetensi teknis di bidang administrasi perkantoran dan akuntansi. Penggunaan Siskeudes telah dimulai, tetapi penguasaan fitur pelaporan dan evaluasi belum merata. Kebutuhan lain yang disebutkan adalah pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta penataan dokumen aset. Temuan kebutuhan ini menjadi dasar penyusunan materi pelatihan dan pendampingan. (Cahyani et al., 2022; Widiawati et al., 2022; Jati et al., 2023; Safelia, 2023).

Rancangan Intervensi Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Interpretasi hasil perlu menghubungkan capaian kuantitatif dengan pendekatan pelaksanaan program. Peningkatan nilai pengetahuan, apabila ditemukan, dapat menunjukkan bahwa materi dan metode penyampaian membantu peserta memahami prosedur administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Capaian keterampilan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai kemampuan peserta menerapkan pengetahuan dalam praktik. Sementara itu, kepuasan peserta dapat membantu menjelaskan penerimaan terhadap metode pelatihan dan relevansi materi. Namun, ketiga indikator tersebut mengukur aspek yang berbeda. Tingginya kepuasan tidak secara otomatis membuktikan peningkatan kompetensi, sedangkan peningkatan hasil tes tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa prosedur kerja telah diterapkan secara konsisten di lingkungan pemerintahan desa.

Pada aspek keuangan, pendampingan diarahkan pada penatausahaan, pengarsipan bukti transaksi, rekonsiliasi catatan manual dengan Siskeudes, serta sinkronisasi data perencanaan RPJMDes/RKPDes dengan pelaksanaan anggaran. Intervensi tersebut berkaitan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang menuntut tertib pencatatan dan pertanggungjawaban (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018). (Ayem & Ariyanti, 2023; Taufik & Ikram, 2022; Sakdiyah et al., 2023; Khoirudin et al., 2024).

Rancangan Digitalisasi Sistem Pelaporan

Pada aspek digitalisasi, program menawarkan pemanfaatan penyimpanan awan untuk pencadangan dokumen penting serta dashboard desa untuk menyajikan data administrasi, kegiatan, dan keuangan. Dashboard dirancang menampilkan grafik, indikator kinerja, dan realisasi anggaran serta dapat diakses oleh perangkat desa. Rancangan ini dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan membantu penyajian informasi yang terintegrasi. Penguatan kompetensi pengguna tetap diperlukan agar proses transformasi digital tidak berhenti pada penyediaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari prosedur kerja (Wulandari et al., 2025). (Faozanudin et al., 2023; Sihombing & Lumbantobing, 2024; Rodiyah & Bolanitan, 2024; Muwardi & Sukmana, 2024; Amiril & Choiriyah, 2024; Pribadi et al., 2024). (Rahayu & Rahmawati, 2022; Wulandari et al., 2025).

Indikator Evaluasi dan Keterbatasan Data Hasil

Dokumen PKM menetapkan sejumlah target evaluasi, yaitu kenaikan skor pengetahuan minimal 30%, sekurang-kurangnya 80% peserta mampu melakukan input data tanpa kesalahan, skor kepuasan rata-rata minimal 4,0, serta tersedianya dan terdistribusinya modul dan dokumentasi. Target tersebut merupakan indikator keberhasilan yang direncanakan, bukan hasil yang telah terukur. Dokumen sumber yang tersedia belum menyajikan tanggal dan durasi pelaksanaan aktual, jumlah peserta yang hadir, nilai pre-test dan post-test, hasil uji keterampilan, skor kepuasan, atau bukti bahwa dashboard dan SOP telah selesai diterapkan. (Setyorini et al., 2022; Juwita & Murti, 2023).

Dengan demikian, pembahasan hasil pada naskah ini masih terbatas pada analisis kebutuhan mitra dan rancangan intervensi yang dijelaskan dalam laporan PKM. Untuk memenuhi ketentuan artikel hasil pengabdian, penulis perlu menambahkan bukti empiris pelaksanaan, dokumentasi kegiatan, produk yang benar-benar dihasilkan, serta analisis perubahan sebelum dan sesudah program. Tanpa data tersebut, efektivitas intervensi dan dampak bagi mitra belum dapat disimpulkan.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Tabel 1. Indikator evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen PKM

Komponen	Instrumen	Target dalam Dokumen PKM
Pengetahuan	Pre-test dan Post-test	Kenaikan skor minimal 30%
Keterampilan	Lembar kerja praktik	80% peserta mampu input data tanpa kesalahan
Sikap/ kepuasan	Koesioner kepuasan	Skor rata-rata ≥4,0
Output	Modul dan dokumentasi	Tersedia dan terdistribusi 100%
Outcome	Laporan keuangan desa	Tidak ada keterlambatan laporan ke kecamatan



Gambar 1. Kegiatan praktek yang dilakukan oleh perangkat Desa



Gambar 2. Peserta mendengarkan pemaparan materi yang dilakukan oleh narasumber



Gambar 3. Akhir kegiatan PKM

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab kebutuhan aparatur desa di Kecamatan Sukamara dalam memperkuat tertib administrasi, pengelolaan keuangan, dan digitalisasi sistem pelaporan. Rangkaian solusi yang disusun mencakup pelatihan, praktik,

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pendampingan lapangan, penyusunan SOP, pemanfaatan Siskeudes, penyimpanan awan, dan dashboard desa.

Keberlanjutan program diarahkan melalui penerapan SOP dan modul yang telah dihasilkan, pendampingan teknis sesuai kebutuhan, serta evaluasi berkala terhadap kelengkapan administrasi dan penerapan SISKEUDES. Pemerintah desa mitra diharapkan menetapkan aparatur penanggung jawab tindak lanjut dan mengintegrasikan hasil pelatihan ke dalam prosedur kerja rutin. Pemantauan berikutnya diperlukan untuk memastikan bahwa capaian pelatihan dapat diterapkan secara konsisten dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Dokumen sumber telah menetapkan sasaran serta indikator evaluasi, tetapi belum memuat data capaian aktual yang cukup untuk menyimpulkan efektivitas program. Oleh karena itu, pelengkapan data pelaksanaan dan evaluasi menjadi prasyarat sebelum artikel dinyatakan sebagai naskah hasil pengabdian final. Keberlanjutan program dapat diarahkan melalui monitoring dokumen desa, konsultasi berkala, dan pendampingan penggunaan sistem digital. (Cahyani et al., 2022; Anggraeni & Fitriyah, 2024; Faozanudin et al., 2023; Sihombing & Lumbantobing, 2024).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Pontianak PSDKU Polnep di Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kecamatan Sukamara, pemerintah desa, serta aparatur desa yang menjadi mitra kegiatan. Pernyataan sumber pendanaan dan nomor kontrak kegiatan perlu ditambahkan sesuai dokumen pendanaan resmi.

DAFTAR PUSTAKA

Afifi, Z., Mulyanto, M., & Nugroho, D. H. (2021). The effect of internal control system and village apparatus competence on village fund management accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research, 5*(3), 2425–2429. https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i3.3132

Amiril, N., & Choiriyah, I. U. (2024). Challenges and opportunities in transforming rural governance through e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1414

Anggraeni, M., & Fitriyah, H. (2024). Optimizing village accountability through SISKEUDES financial system implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(2). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i2.1395

Ayem, S., & Ariyanti, N. (2023). Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 4*(2), 286–297. https://doi.org/10.31258/current.4.2.286-297

Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The village financial management through accountability, transparency and community participation. *Perspektif Akuntansi, 6*(1), 15–36. https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36

Cahyani, C. Z., Basri, Y. M., & Kurnia, P. (2022). Accountability, transparency, competence of village apparatus, and internal control system in village financial management. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 7*(1), 77–94. https://doi.org/10.20473/baki.v7i1.30786

Faozanudin, M., Rosyadi, S., & Sulistiani, L. S. (2023). The preparedness of village governments for the digital transformation of public services in Banyumas Regency, Indonesia. *Public Policy and Administration, 22*(4), 448–462. https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-4-05

Fathurrahman, A., Suprihati, S., & Samanto, H. (2022). The influence of the quality of human resources, community participation, and utilization of information technology on village fund management accountability in Klaten Regency. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research, 6*(3), 1803–1811.

Fauziah, N., & Hermawan, S. (2022). Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) to improve village financial management accountability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 13*. https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.788

Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of village apparatus performance, internal control, information technology utilization on village fund accountability and implications on quality village financial report. *Dinasti International Journal of Management Science, 2*(4), 569–580. https://doi.org/10.31933/dijms.v2i4.784

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi, 33*(2). https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p15

Juwita, R., & Murti, G. T. (2023). Influence of village apparatus competence and clarity of budget targets for accountability of village fund management. *International Journal of Entrepreneurship and Business Management, 2*(2), 124–137. https://doi.org/10.54099/ijebm.v2i2.800

Khoiroh, M., & Agustina, I. F. (2024). Bridging the digital divide to improve village governance for global efficiency. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1391

Khoirudin, K., Sasongko, N., & Witono, B. (2024). Key drivers of village fund management accountability: Insights from Sukoharjo district. *JIFA: Journal of Islamic Finance and Accounting, 7*(1). https://doi.org/10.22515/jifa.v7i1.9736

Maharani, N. I., & Widodo, H. (2024). Accountability of village fund management with the Village Financial System application. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19*(4). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1179

Muwardi, A. A., & Sukmana, H. (2024). E-government boosts administrative efficiency in rural Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1376

Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19*(2). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040

Pribadi, U., Iqbal, M., Ibrahim, M. A., Juhari, & Ahdarrijal, Y. (2024). Nexus of public organization, transparency, and accountability in Indonesia's digital governance. *Journal of Public Affairs, 24*(3), e2940. https://doi.org/10.1002/pa.2940

Rahayu, E., & Rahmawati, I. D. (2022). Analysis of the Village Financial Information System on village fund management accountability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 11*. https://doi.org/10.21070/ijccd.v11i0.808

Rodiyah, I., & Bolanitan, Z. O. (2024). Enhancing digital literacy in village government for effective SID program implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 24*. https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1335

Safelia, N. (2023). The influence of village apparatus competency, utilization of information technology and internal control system on village fund management accountability. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 8*(1), 74–87. https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507

Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). The influence of accountability, transparency, community participation and the village financial system on the effectiveness of village fund management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 11*(3), 503–514. https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635

Setyorini, C. T., Susilowati, D., Farida, Y. N., & Ramadhanti, W. (2022). Pelatihan aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa: Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi desa. *Jurnal Pengabdian Bisnis dan Akuntansi, 1*(1), 70–78. https://doi.org/10.32424/1.jpba.2022.1.1.6685

Sihombing, T., & Lumbantobing, R. D. H. (2024). Digital technology adoption for village public administration—Evidence from Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8*(4), Article 3444. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3444

Sofia, D., & Fitriyah, H. (2022). The role of community participation, accountability, and transparency on the effectiveness of village fund management. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 13*. https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.819

Taufik, O., & Ikram, S. (2022). Factors affecting village financial management accountability. *Journal of Accounting Auditing and Business, 5*(2), 29–42. https://doi.org/10.24198/jaab.v5i2.39320

Wardani, N. A. K., Hikmah, N., Ulfah, S., Sholikah, M., & Purwati, P. (2023). Sharia accounting perspective: The influence of community participation, use of information technology, and apparatus competence on village fund management accountability. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*(3), 4231–4236. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11361

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Widiawati, D., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2022). Analysis of determinants on village fund management accountability. *Urecol Journal. Part B: Economics and Business, 2*(1), 9–19. https://doi.org/10.53017/ujeb.128

Wulandari, M., Novriyanti, T., Purwadhi, P., & Widjaja, Y. R. (2025). Implementasi strategi transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit: Studi kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(1), 1415–1427. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17847

Yudastio, Y., & Azriya, N. (2022). Accountability, transparency, and participation in village fund management. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6*(1). https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.28997

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license